

Ketergantungan Kelompok Tani Hutan Wana Sejahtera terhadap Kawasan Hutan Lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus

M. Andes Al Aziz^{1*}, Slamet Budi Yuwono², Hari Kaskoyo³, Samsul Bakri⁴

¹Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

Jl. Soemantri Brodjonegoro, Gd. Meneng, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

email: mandes3030@gmail.com

Artikel Info	Abstract
Received: 12 juli 2021 Received is revised: 11 agustus 2022 Accepted: 5 juni 2023 Publish online: 11 desember 2023	<i>The Wira Karya Sejahtera Forest Farmers Group (KTH) community always fulfills their daily needs depending on the forest products they manage. Since 2014 the KTH was formed with a land area of 329 ha managed by 210 members, the community is still looking for the main source of income only in the managed area. This study aims to calculate the income obtained from each activity, calculate the contribution of activities to the total income of the community, and identify the community's dependence on the forest area in the KTH. The number of respondents in this study amounted to 30 people according to the slovin technique with $e = 20\%$. The dependence of respondents from KTH wana sejahtera to forest areas has a total of 30 respondents and only 16 respondents who have the dependents criteria. This number states that the respondents who fall into the criteria depend, more on the respondents who fall into the percentage of dependent categories is very high, compared to the criteria for the level of dependence (independent and high dependent). With a percentage of 53,3% greater than other two criteria. So it can be concluded that KTH wana sejahtera farmers have criteria for the level of dependence on forest areas that still dependent on meeting basic daily needs.</i>

Keywords: Forest area, KTH, Income, Dependent to forest area .

Abstrak

Masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH) Wana Sejahtera selalu memenuhi kebutuhan hidup harian bergantung terhadap hasil hutan yang dikelolanya. Sejak tahun 2014 KTH tersebut dibentuk dengan luas lahan 201 ha yang dikelola 367 anggota, masyarakat masih tetap mencari sumber pendapatan utama hanya di kawasan HKm dan Non HKm yang dikelola. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung pendapatan yang diperoleh dari setiap kegiatan, serta mengidentifikasi ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan di KTH tersebut. Jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 30 orang menurut teknik slovin dengan $e=20\%$. Petani KTH wana sejahtera memiliki pendapatan yang beragam yaitu pendapatan terendah sebesar Rp.1.000.000/bulan dan memiliki pendapatan tinggi sebesar Rp.7.000.000/bulan. Ketergantungan responden dari KTH wana sejahtera terhadap kawasan hutan memiliki jumlah responden sebanyak 30 orang dan hanya 16 responden yang memiliki kriteria Tergantung. Jumlah tersebut menyatakan bahwa responden yang masuk kedalam kriteria tingkat ketergantungan lainnya. Sehingga demikian

persentase kategori Tergantung sangat tinggi dibandingkan dengan Kriteria tingkat ketergantungan (Tidak Tergantung, dan Sangat Tergantung). Dengan persentase 53,3% lebih besar dari dua kriteria lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Petani KTH wana sejahtera memiliki kriteria tingkat ketergantungan masih (Tergantung) terhadap kawasan hutan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kata kunci: Kawasan hutan, KTH, Pendapatan, Ketergantungan terhadap kawasan hutan.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sistem sumber daya alam yang memberi manfaat multiguna baik berupa kayu maupun non kayu serta memberikan manfaat dari segi ekonomi dan sosial. Hutan kemasyarakatan adalah hutan milik negara yang dikelola oleh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian (Kaskoyo *et al.*, 2017; Wulandari & Inoue, 2018) dan memenuhi keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu persoalan ekonomi dan sosial menjadi sasaran pemerintah dalam memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Pelibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan hutan negara secara formal baru dimulai ketika Departemen Kehutanan meluncurkan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada akhir tahun 1990-an yang memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk mengelola lahan hutan negara. Kelompok tani yang bernama Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH) bermaksud untuk memperoleh ijin pengelolaan (Gumay 2008).

Ketergantungan masyarakat terhadap hutan sudah lama terjadi. Menurut Sukardi, *et al.* (2008); disatu sisi ketergantungan terhadap keberadaan hutan akan menjadi insentif bagi masyarakat untuk memeliharanya; didasarkan pada berbagai kearifan lokal yang diyakini secara turun temurun. Namun di sisi lain, akibat desakan kebutuhan yang semakin meningkat serta adanya faktor-faktor lain justru akan menjadi pemicu perambahan hutan. Permasalahan pada eraglobalisasi adalah kesulitan masyarakat dalam mencari pekerjaan, terutama masyarakat yang hidup berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Perambahan yang merupakan masalah bagi kawasan hutan sendiri juga merupakan salah satu cara masyarakat agar dapat bertahan hidup. Modal sosial memiliki peran dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) yaitu sebagai sumber daya yang dapat mendorong individu atau kelompok untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan (Puspita, 2020).

Hkm pada dasarnya merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk ditanami guna diambil hasilnya. Pemerintah membuat program Hutan Kemasyarakatan untuk mengurangi laju kerusakan hutan yang tiap tahun makin bertambah yang terjadi akibat perambahan dan *illegal logging* (Surastyawan, 2017). Program pengelolaan hutan berbasis masyarakat memberikan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi mengelola hutan negara; salah satunya dilakukan melalui pola tanam agroforestri di hutan desa. Agroforestri tersebut terbentuk melalui pembukaan lahan hutan oleh masyarakat (Mulyana, *et al.* 2017).

KTH Wana Sejahtera merupakan sebagian dari kelompok Tani di HKm Wira Karya Sejahtera Register 28 KPHL Pematang Neba yang memiliki kawasan pengelolaan seluas 329 ha yang dikelola oleh 210 anggota. Umumnya masyarakat di wilayah ini masih memanfaatkan hutan dengan membuka lahan untuk bercocok tanam dan berternak. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan di KPHL Pematang Neba Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk: menghitung pendapatan kelompok tani wana sejahtera dan Mengidentifikasi tingkat ketergantungan kelompok tani wana sejahtera terhadap kawasan hutan.

METODE

Penelitian ini akan dilaksanakan di Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Wira Karya Sejahtera yang berfokus pada KTH Wana karya sejahtera di Dusun XII Way Tebu Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Januari 2020. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi seperangkat personal komputer, alat tulis kerja, lembar kuisioner, kamera digital, dan aplikasi microsoft excel. Obyek yang dikaji adalah masyarakat yang tergabung di KTH Wana Sejahtera. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung, pengisian kuisioner dan wawancara terhadap responden kelompok tani hutan wana sejahtera. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka dan monografi Hkm. Data sekunder meliputi keadaan geografis, keadaan fisik lingkungan, sarana dan prasarana di lokasi penelitian, lembaga yang terkait di lokasi penelitian seperti Pemerintah Daerah dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pada wawancara terstruktur, hal-hal yang akan ditanyakan telah tersusun dan telah ditetapkan sebelumnya secara rinci melalui kuesioner sedangkan pada wawancara tidak terstruktur hal-hal yang akan ditanyakan tidak ditetapkan secara rinci. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel dilakukan secara sengaja. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, jumlah populasi Kelompok Tani Hutan yang saya pilih yaitu berjumlah 210 responden lalu di persempit menggunakan rumus slovin menjadi 30 responden. Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi yaitu jumlah seluruh populasi dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin menurut (Sugiyono, 2011). Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin karena dalam penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana.

Analisis pendapatan petani dihitung dengan menjumlahkan pendapatan dari hasil kegiatan Non Hkm dan kegiatan HKM (lihat Rumus 1)

Rumus 1:

$$P = PHKm + PtP + PtNP$$

dengan:

P = Pendapatan PHKm

PHKm = Pendapatan kegiatan HKM

PtP = Pendapatan total pertanian

PtNP = Pendapatan total non HKM (Dewi dkk, 2018)

Analisis ketergantungan petani terhadap keberadaan hutan, adalah membandingkan antara pendapatan dari HKM dengan pendapatan Non HKM, apabila pendapatan dari HKM lebih tinggi dari pendapatan Non HKM, maka ketergantungan tinggi, apabila pendapatan Non HKM lebih tinggi dari pendapatan HKM maka tingkat ketergantungan rendah, apabila pendapatan HKM sama dengan Non Hkm maka ketergantungan sedang. Dalam penentuan tingkat ketergantungan kelompok tani dapat di lihat pada tabel 1. Yaitu penentuan hasil dari scoring persentase pendapatan yang di peroleh oleh petani baik itu dari lahan HKM dan Non HKM. Kriteria ketergantungan petani terhadap kawasan hutan di sajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Ketergantungan Terhadap Kawasan Hutan

No	Kriteria	Pada Lahan HKm	Non HKm
1	TT	0-33%	67-100%
2	T	34-67%	33-68%
3	ST	68-100%	<33%

Sumber: (<https://www.jojonomic.com/2021/01/17/ojonomic.com/blog/rumus-pendekatan-pendapatan/>)

Dalam menentukan ketergantungan dapat dilihat dari pendapatan baik itu dari kegiatan HKm dan kegiatan Non HKm terhadap pendapatan total/bulan sehingga diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$KHKm = \frac{PHKm}{P+PHKm} \times 100\%$$

dengan:

KHKm = Kontribusi program HKm bagi pendapatan Masyarakat

PHKm = Pendapatan total dari kegiatan HKm/bulan

P = Pendapatan total non Hkm/bulan (Dewi dkk, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan (safei *et al.* 2018). Salah satu program untuk mengatasi aktivitas masyarakat terhadap tekanan sumber daya hutan adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Program ini untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja, untuk itu setiap aspek dalam unsur-unsur pengelolaan hutan (*planning, organizing, actuating, controlling* atau *POAC*) menjadi sangat strategis sifatnya (Sanjaya, *et al.* 2017).

Pembangunan kehutanan selalu memperhatikan dan bertujuan mewujudkan pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management/SFM*) karena fungsinya yang sangat penting dalam mendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (Sofiandi, *et al.* 2016). Dengan adanya program HKm masyarakat memiliki akses untuk dapat memanfaatkan hasil hutan non kayu yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomi, Tujuan pemberian izin agar masyarakat dapat mengembalikan fungsi hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Budidaya agroforestri merupakan pola budidaya yang dianggap paling tepat untuk mewujudkannya (Ruchyansyah, 2018).

KTH Wana Sejahtera yang tergabung di dalam HKM Wirakarya Sejahtera terletak di Dusun Way Tebu, pekon Gisting atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Areal kerja KTH Wana sejahtera terletak di KPHL Kotaagung Utara Register 28. KTH wana sejahtera memiliki luas lahan 329 ha yang dikelola oleh 210 anggota/responden.

HKM Wirakarya Sejahtera terbentuk pada tahun 2014 yang di ketuai oleh Bapak Jarwo hingga periode 2021. HKM Wira Karya Sejahtera memiliki luas lahan garapan total yaitu sebesar 2.500 Ha yang di kelola oleh 21 kelompok tani yang jumlahnya sebesar 2.055 orang. HKM

Wirakarya Sejahtera memiliki potensi areal kerja sebagai , tanaman MPTS, sumberdaya air, kebun percontohan, dan zona lindung. Masyarakat di Pekon Gisting Atas Dusun Way tebu XII yang tergabung dalam Hkm Wira Karya Sejahtera memanfaatkan lahan dalam bentuk Pola agroforestry dalam memenuhi kebutuhannya, dan mefungsikan lahan hutan sebagai zona lindung.

Dalam (Yulian, *et al.* 2016) dikatakan bahwa; dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.6/Menhut-II/2009, menjelaskan kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) merupakan salah satu pembagian KPH menurut fungsi pokok dan peruntukannya yang ditetapkan karena sebagian dan atau seluruhnya didominasi oleh kawasan lindung. Menurut Undang-undang N0.41 tahun 1999 pasal 1, KPHL memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kotaagung Utara merupakan salah satu KPHL yang ada di Provinsi Lampung, dimana masyarakat di sekitar kawasan hutan yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) memanfaatkan kawasan hutan tersebut melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm). Kawasan hutan sangat penting bagi masyarakat di sekitar hutan untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat dari hasil hutan.

B. Karakteristik Responden

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan hutan sekaligus memberikan manfaat pada masyarakat. Masyarakat diberikan izin untuk mengelola hutan dengan syarat tidak mengembangkan jenis tanaman dengan sistem monokultur melainkan dengan sistem kebun campuran atau agroforestri. Strata tajuk lengkap yang terbentuk dari sistem agroforestri memberikan manfaat ekonomis dan ekologis yang penting bagi petani, salah satunya dapat memberikan pendapatan bagi petani dan mencegah terjadinya banjir. Sehingga penerapan sistem agroforestri pada lahan HKm diharapkan menjadi solusi untuk kebutuhan lahan sebagai faktor produksi sekaligus untuk pemulihan hutan terutama fungsi life support system(Winarni. *et al.* 2016). Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan suatu skema pemberdayaan masyarakat melalui penguatan faktor produksi hasil hutan bukan kayu berupa akses terhadap lahan hutan, utamanya hutan lindung (Yudischa, 2014).

1). Umur

Pada umumnya, Petani akan selalu mencari pendapatan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sumastuti (2009), berpendapat bahwa tinggi rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga dipengaruhi oleh bermacam-macam, antara lain jumlah tenaga kerja yang tersedia dan luas lahan garapan. Selain itu, pengalamannya dan tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang diterima (Nafisah, 2017). Umur responden yang diambil sebanyak 30 orang yang terdapat di KTH Wana Sejahtera. dari umur 25 tahun sampai 78 tahun. Usia tersebut merupakan usia produktif seseorang dalam melakukan sebuah pekerjaan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal (Putri dan Setiawina, 2013).

Terdapat 7 responden yang berada pada kelompok umur 25-35 tahun, 9 responden berada di kelompok umur 36-50 tahun, dan 14 responden berada pada kelompok umur 51-78 tahun. Kelompok umur 51-78 tahun merupakan umur yang paling tua dan memiliki frekuensi paling banyak. Hal ini menunjukkan petani di tiga KTH ini banyak yang telah memasuki usia tua. Keadaan umur tersebut diduga dapat mempengaruhi tingkat produktif dalam bertani, artinya semangat bertani mulai berkurang sehingga pendapatan kurang maksimal (Adalina, *et al.*, 2015). Data umur pada responden dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik umur responden

No	Umur Peserta HKm	Responden	Persentase (%)
1	25-35	7	23,3 %
2	36-50	9	30 %
3	51-78	14	46,6 %
	Jumlah	30	100%

Sumber: data primer 2019

2) Pendidikan

Tingkat pendidikan pada KTH Wana Sejahtera menunjukkan tingkat pendidikan paling tinggi yaitu SLTA dan terendah yaitu SD. Semua responden menempuh pendidikan meskipun masih banyak responden (50%) yang hanya menempuh pendidikan sampai dengan tingkat SD saja. Hal ini diduga karena masih kurangnya semangat dalam menempuh pendidikan. Pada umumnya. Hal ini juga dapat mempengaruhi pendapatan Petani. Demikian pula petani akan selalu mencari pendapatan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sumastuti (2009), berpendapat bahwa tinggi rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga dipengaruhi oleh bermacam-macam, antara lain jumlah tenaga kerja yang tersedia dan luas lahan garapan. Selain itu, pengalamannya dan tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang diterima (Nafisah, 2017). Data karakteristik tingkat pendidikan disajikan pada tabel 3.

Table 3. Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase (%)
1	SD	15	50 %
2	SLTP	7	23,3 %
3	SLTA	8	26,6 %
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data primer 2019.

3) Jumlah Tanggungan

Jumlah tanggungan akan mempengaruhi besarnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh kepala keluarga atau responden. Bahwa kepala keluarga di KTH Wana Sejahtera memiliki tanggungan yang tidak terlalu banyak. Disini, jumlah tanggungan termasuk dalam anak, istri, dan kerabat yang ikut ditanggung dalam satu rumah seperti kakek dan nenek, yang tidak ataupun belum bekerja. Dengan demikian, semakin banyaknya anggota keluarga yang ditanggung oleh seorang kepala keluarga akan semakin banyak pengeluaran yang ditanggungnya. Hal ini akan mempengaruhi seseorang dalam mencari penghasilan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Yudischa dkk., 2014). Berikut data karakteristik jumlah tanggungan di sajikan di dalam tabel 4.

Table 4. Jumlah Tanggungan

No	Jumlah Tanggungan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	1-2	17	56,6
2	2-3	8	26,6
3	3>	5	16,6

Jumlah	30	100
--------	----	-----

Sumber: Data primer 2019

Jumlah tanggungan ini akan mempengaruhi besarnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh kepala keluarga atau responden. terlihat bahwa kepala keluarga dari 3 KTH memiliki tanggungan yang berbeda-beda dan tidak terlalu banyak. Disini, jumlah tanggungan tertinggi yaitu berjumlah 17 responden memiliki persentase yang tertinggi pula. Jumlah tanggungan tersebut terdapat anak, istri, dan kerabat yang ikut ditanggung dalam satu rumah seperti kakek dan nenek, yang tidak ataupun belum bekerja. Sehingga kepala keluarga akan lebih ekstra dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

4) Luas Lahan garapan

Luas lahan garapan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu lahan HKm dan Lahan marga. Responden pada KTH Wana Sejahtera rata-rata memiliki lahan garapan yang berbeda baik itu luas lahan yang tidak sama dan jumlah pengelola pada masing-masing lahan yang berbeda. Data luas lahan garapan pada lahan HKm disajikan pada tabel 5.

Tabel 5. Lahan Garapan HKm

No	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Responden
1	0-1,5	5
2	2-2,5	6
3	3,5>	19
Jumlah		30

Sumber: Data primer 2019

Table di atas menunjukkan bahwa pembagian luas garapan lahan HKm tidak merata. Masih banyak petani di KTH Wana sejahtera tersebut yang mengolah lahan seluas 0-1,5 hektare yaitu sebanyak 5 responden, jumlah tersebut menunjukkan adanya keterkaitannya dengan tingkat pendidikan dan faktor umur responden (tabel 6).

Tabel 6. Lahan Garapan Marga

No	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Responden
1	0-1,5	10
2	2-2,5	15
3	3,5>	5
Jumlah		90

Sumber: Data primer 2019

Responden yang memiliki garapan lahan marga pada luas 0 sampai 1,5 ha yaitu sebanyak 10 petani, pada luas 2 sampai 2,5 ha yaitu sebanyak 15 petani dan pada luas 3,5> yaitu sebanyak 5 petani. Pada data di atas menunjukkan adanya perbedaan yang nyata dalam pengelolaan lahan garapan marga. Menurut data dilapangan selaku ketua Gapoktan wirakarya sejahtera bapak Jarwo menyampaikan, lahan garapan marga sangat dipengaruhi oleh harta warisan dari setiap masing-masing keluarga, tidak heran mengapa jika dilihat dari data diatas bahwa setiap kepala keluarga memiliki jumlah lahan garapan yang berbeda-beda. Luas garapan petani tentu akan sangat berpengaruh terhadap penghasilan yang dihasilkan dari lahan yang mereka miliki (Adalina dkk.

2015). Data tersebut menunjukkan bahwa semakin luas lahan yang digarap oleh seorang petani, maka penghasilan yang diperoleh akan semakin besar, sebaliknya jika luas lahan yang digarap petani tersebut semakin kecil maka penghasilan yang diperoleh akan semakin kecil.

C. Tingkat Pendapatan

Sumber pendapatan yang diperoleh masyarakat KTH Wana Sejahtera memiliki dua pokok sumber pendapatan yaitu dari lahan HKm dan Non HKm. Pendapatan yang diperoleh dari lahan HKm berasal dari tanaman agroforestri berupa hasil bukan kayu sehingga lahan yang dikelola akan tetap lestari. Pendapatan yang diperoleh dari Non HKm didapat dari pendapatan di luar lahan HKm seperti hasil dari usaha mandiri yang dimiliki yang berupa warung, bengkel, dan usaha lainnya.

Tabel 7. Tingkat pendapatan lahan HKm

No	Kategori pendapatan berdasarkan UMR daerah	Kriteria tingkat pendapatan	Tingkat pendapatan/Bulan (Rp)	Luas lahan (Ha)	Jumlah responden
1	Rp. 1- 1,5 juta	Rendah	1.000.000	0,1-1,5	5
2	>Rp. 1,5- 2 juta	Sedang	2.700.000	1,5-2,5	6
3	> Rp. 2 juta	Tinggi	7.000.000	3,5>	19
Jumlah					30

Sumber: Data primer 2019

Hutan Kemasyarakatan merupakan suatu solusi yang diberikan pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar hutan. Fungsi dari HKm itu sendiri yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan kawasan hutan. (Puspasari.,Dkk. 2017) Pendapatan responden dari kegiatan di lahan HKm sangat dipengaruhi oleh luas garapan, semakin tinggi luas garapan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh (Puspasari.,Dkk. 2017). Pendapatan pada lahan HKm dikategorikan dalam tiga bagian antara lain:

1. Pendapatan terendah perbulan pada lahan HKm memiliki Jumlah sebesar Rp. 1.000.000/bulan, jumlah responden yang memiliki nilai pendapatan terendah yaitu 5 orang yang hanya memiliki lahan 0,1-1,5 ha.
2. Pendapatan sedang/bulan pada lahan HKm memiliki Jumlah sebesar Rp. 2.700.000/bulan, jumlah responden yang memiliki nilai pendapatan sedang yaitu 6 orang yang hanya memiliki lahan 1,5-2 ha.
3. Pendapatan tertinggi/bulan pada lahan HKm memiliki Jumlah pendapatan sebesar Rp. 7.000.000/bulan, jumlah responden yang memiliki nilai pendapatan Tinggi yaitu berjumlah 19 orang yang memiliki lahan >2 ha.

Tabel 8. Tingkat pendapatan Non HKm

No	Kategori pendapatan berdasarkan UMR daerah	Kriteria tingkat pendapatan	Tingkat pendapatan/Bulan (Rp)	Luas lahan (Ha)	Jumlah responden
1	Rp. 1- 1,5 juta	Rendah	700.000	0,1-1,5	9
2	>Rp. 1,5- 2 juta	Sedang	2.000.000	1,5-2,5	7
3	> Rp. 2 juta	Tinggi	5.000.000	3,5>	14
Jumlah					30

Sumber: Data primer 2019

Hutan Kemasyarakatan merupakan suatu solusi yang diberikan pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar hutan. Fungsi dari HKm itu sendiri yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan kawasan hutan. Pendapatan pada lahan HKm dikategorikan dalam tiga bagian antara lain:

1. Pendapatan terendah perbulan pada lahan HKm memiliki Jumlah sebesar Rp. 700.000/bulan, jumlah responden yang memiliki nilai pendapatan terendah yaitu 9 orang yang hanya memiliki lahan 0,1-1,5 ha.
2. Pendapatan sedang/bulan pada lahan HKm memiliki Jumlah sebesar Rp. 2.000.000/bulan, jumlah responden yang memiliki nilai pendapatan sedang yaitu 7 orang yang hanya memiliki lahan 1,5-2 ha.
3. Pendapatan tertinggi/bulan pada lahan HKm memiliki Jumlah pendapatan sebesar Rp. 5.000.000/bulan, jumlah responden yang memiliki nilai pendapatan Tinggi yaitu berjumlah 14 orang yang memiliki lahan >2 ha.

D. Ketergantungan Kelompok Tani Hutan Terhadap Kawasan Hutan

Pendapatan merupakan jumlah produksi yang dihasilkan dalam kegiatan usaha. Pendapatan petani KTH Wana Sejahtera diperoleh dari dua sumber yaitu dari lahan HKm dan hasil dari kegiatan Non HKm. Berikut data tersebut di sajikan pad tabel 9.

Ketergantungan masyarakat terhadap hutan sudah lama terjadi. Menurut Sukardi, *et al.* (2008), disatu sisi ketergantungan terhadap keberadaan hutan akan menjadi insentif bagi masyarakat untuk memeliharanya, didasarkan pada berbagai kearifan lokal yang diyakini secara turun temurun. Namun di sisi lain, akibat desakan kebutuhan yang semakin meningkat serta adanya faktor-faktor lain justru akan menjadi pemicu perambahan hutan. Peraturan perundangan yang berlaku memang memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan (termasuk memanfaatkan hasil hutan), namun harus mematuhi berbagai ketentuan dan rambu-rambu yang berlaku. Mangandar (2000); mengemukakan bahwa interaksi masyarakat dengan kawasan yang dilindungi dapat diarahkan pada suatu tingkat integrasi dimana keperluan masyarakat akan sumberdaya alam dapat dipenuhi tanpa mengganggu atau merusak potensi kawasan.

Tabel 9. Persentase Pendapatan Petani/bulan dari lahan HKm dan pendapatan Non HKm

No	Responden	Pendapatan/bulan		(%) Pendapatan Hkm	Kriteria
		Hkm (Rp)	Non Hkm (Rp)		
1	SALAMUN	2000000	3000000	40	T
2	IBROHIM K	1000000	1800000	36	T
3	M. ZAINI	7000000	1400000	83	ST
4	SUKRONI	4000000	2400000	63	T
5	A.WAHID	6000000	3000000	67	T
6	M. KARI	3000000	2000000	60	T
7	M. LIAS	1800000	5000000	26	TT
8	ROMAS L	1400000	4000000	26	TT
9	AFIN	2400000	1000000	71	TT
10	SUWANTO	3000000	2000000	60	T
11	SAMUN	2000000	1800000	53	T
12	BUNYANA BL	5000000	1400000	78	ST
13	BUNYARI	4000000	2400000	63	T
14	SATALINDO	1000000	3000000	25	TT
15	KHOIRI R	2000000	2000000	50	T
16	M.NURSYAM	1000000	5000000	17	TT
17	RASIT	7000000	4000000	64	T
18	BAHRA	4000000	1000000	80	ST
19	BASRI MK	6000000	3000000	67	T
20	GUNAWAN	3000000	1000000	75	ST
21	RIDUAN	1800000	4500000	29	TT
22	SUHARJI	1400000	2000000	41	T
23	SUPIAN NOVI	2400000	4800000	33	TT
24	WILDAN	3000000	4000000	43	T
25	ROHIMI HALIM	2000000	1000000	67	T
26	BASIT	5000000	2000000	71	ST
27	SURONO	4000000	3000000	57	T
28	NAHRAWI	1000000	700000	59	T
29	KHOIRUDIN	3000000	1000000	75	ST
30	SUGENG	2000000	850000	70	ST

Sumber: Data primer 2019

Untuk menentukan ketergantungan responden terhadap kawasan hutan penulis melakukan analisis persentase dari pendapatan/bulan yang didapat dari lahan HKm dan Kegiatan Non HKm yang disajikan pada tabel 9. Sehingga setelah dilakukan penganalisisan terhadap dua sumber pendapatan maka selanjutnya adalah pengelompokan responden yang nantinya akan di dapatkan hasil persentase dari tiga kriteria yaitu Tidak tergantung, Tergantung dan sangat tergantung terhadap kawasan hutan. Data tersebut di sajikan pada tabel 10.

Tabel 10. Ketergantungan terhadap kawasan hutan

No	Pendapatan	Jumlah Responden	Persentase (%)	Tingkat ketergantungan
1	Lahan HKm dan Non HKm	7	23,3	TT
2	Lahan HKm dan Non HKm	16	53,3	T
2	Lahan HKm dan Non HKm	7	23,3	ST

Sumber: Data skunder 2019

Ketergantungan petani terhadap keberadaan hutan, adalah membandingkan antara pendapatan dari HKm dengan pendapatan Non HKm, apabila pendapatan dari HKm lebih tinggi dari pendapatan Non HKm, maka ketergantungan tinggi, apabila pendapatan Non HKm lebih tinggi dari pendapatan HKm maka tingkat ketergantungan rendah, apabila pendapatan HKm sama dengan Non HKm maka ketergantungan sedang (Sukardi, dkk.. 2008).

1. Besarnya jumlah total ketergantungan yaitu dengan persentase pendapatan sebesar 23,3% yang jumlah responnya yaitu sebanyak 7 responden sehingga nilai tersebut dapat dikategorikan tidak tergantung pada lahan kawasan hutan.
2. Besarnya jumlah total tingkat ketergantungan yaitu dengan persentase pendapatan sebesar 53,3% yang jumlah respondennya yaitu sebanyak 16 Responden, sehingga nilai tersebut dapat dikategorikan tergantung pada lahan kawasan hutan.
3. Besarnya jumlah total tingkat ketergantungan yaitu dengan persentase pendapatan sebesar 23,3% yang jumlah respondennya yaitu sebanyak 7 Responden , sehingga nilai tersebut dapat dikategorikan sangat tergantung pada lahan kawasan hutan.

Data pada tabel 10 di atas menerangkan bahwa seberapa besar tingkat ketergantungan kelompok tani hutan Wana sejahtera terhadap kawasan hutan. Dari segi pemanfaatan lahan hutan di atas menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar hutan masih tergantung terhadap kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari yang dapat dilihat besarnya jumlah pendapatan responden yang tergolong tergantung sebesar 16 responden (Neil, dkk, 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Petani KTH wana sejahtera memiliki pendapatan yang beragam yaitu pendapatan terendah sebesar Rp.1.000.000/ dan memiliki pendapatan tinggi sebesar Rp.7.000.000/bulan.

Ketergantungan responden dari KTH wana sejahtera memiliki jumlah sebanyak 16 responden yang tergantung terhadap hutan dapat dilihat dari pendapatan baik itu dari kegiatan di lahan HKm dan kegiatan dari Non HKm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Petani KTH wana sejahtera memiliki kriteria tingkat ketergantungan masih Tergantung terhadap kawasan hutan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

B. Saran

Perlu di lakukan penyuluhan terhadap kelompok tani agar lebih baik dalam mengelola hutan dan memberikan wawasan lebih tinggi terhadap KTH wana sejahtera mengenai lapangan pekerjaan yang lain sehingga kemudian hari agar tidak selalu bergantung terhadap kawasan hutan dan terciptalah jiwa yang lebih kreatif dan mandiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Bapak dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam urusan skripsi dan jurnal, saya ucapkan terimakasih kepada tim pengurus jurnal Josder, saya ucapkan terimakasih kepada bapak/dosen yang telah memberikan ilmu dalam kuliah, dan saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman yang selama ini telah membantu pengambilan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Adalina, Y., Nurrochman, R. R., Darusman, D. & Sundawati, L. 2015. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Taman nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*. 12(2): 105-118
- Febryano, IG. 2008. Analisis Finansial Agroforestri Kakao di Lahan Hutan Negara dan Lahan Milik. *Jurnal sylvia Lestari*. 4(1) : 41-47
- Kaskoyo, H., Mohammed, A.J., & Inoue, M. 2014. Present State Of Community Forestry Hutan Kemasyarakatan Program In A Protection Forest And Its Challenges: Case Study In Lampung Province, Indonesia. *Journal Of Forest Science*. 30 (1) : 15-29
- Mangandar. 2000. Keterkaitan Masyarakat di Sekitar Hutan dengan Kebakaran Hutan. Tesis tidak diterbitkan. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor
- Mulyana, L., Febryano, IG., & Aminah, Nl., 2018. Performa Penghasilan Agroforestri Di Wilayah Kesatuan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Raja Basa. *Junal Sylva Lestari*. 5(2) : 127-133
- Nafisah, J. 2017. Pengaruh Demografi Terhadap Pendapatan Tenaga Kerja Sekrot Primer Di Indonesia: Skripsi. Universitas Yogyakarta 180 (hlm)
- Neil, A., Golar., & Hamzari. 2016. Analisis Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Tanaman Nasional Lore Rindu. *Jurnal Mitra Sains*. 4(2) :29-39.
- Pustpita, NT., Qurniati, R., & Febryano, IG., 2020. Modal Sosial Masyarakat Pengelolaan Hkm Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batu Tegi. *Jurnal Sylva Lestari*. 8(1) : 54-64.
- Puspasari E. 2017. Aspek social ekonomi Pada Sistem Agroforestri Di Areal Kerja Hkm Kabupaten Lampung Bara Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(3) : 95 – 103.
- Putri, A.D. & Setiawan, N.D. 2013. Pengaruh umur, prndidikan, pekerjaan terhadap pendapatan rumah tangga miskin di desa babandem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 2(4): 1-9.
- Ruchyansyah, Y., Wulandari, C., & Riniarti, M., 2018. Pengaruh Pola Budidaya Pada Hutan Kemasyarakatan Di Areal Kelola Kph VIII Batu Tegi, Terhadap Pendapatan Petani dan Kesuburan Tanah. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(1) : 100-106

- Sanjaya, R., Wulandar, IC., & Herwanti, S., 2017. Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera Di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(2) : 30-42
- Sofiandi, R.R., Hilmanto, R., & Herwanti, S. 2016. Analisis Pendapatan Dan Kesejahteraan Petani Agroforestri Di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. *Jurnal sylva lestari*. 4(2) : 17-26
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- Sumastuti E., 2009. Model tabungan rumah tangga kota semarang. *Jejak*. 2(1): 65-79.
- Sukardi, L. D., Darusman, L., Sundawti, & Hardjanto, 2008. Karakteristik dan Faktor Penentu Interaksi Masyarakat Lokal dengan Taman Nasional Gunung Rinjani Pulau Lombok. *Jurnal Agroteksos*. 18 (1-3): 54-62.
- Yudischa, R., Wulandari, C., & Hilmanto, R. 2014. Dampak partisipasi wanita dan faktor demografi dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (hkm) terhadap pendapatan keluarga di kabupaten lampung barat. *Jurnal Sylva Lestari*. 2(3): 59-72.
- Winarni S., Yuwono B.S., & Herwanti S. 2016. Struktur Pendapatan Tingkat Kesejahteraan Dan Factor Produksi Agroforestri Kopi Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Tegi, *Jurnal Sylva Lestari*. 4(1) : 1-10
- Yulian, R., Hilmanto, R., & Herwanti, S. 2016. Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani Agroforestri di Hutan Kemasyarakatan Bina Wana Jaya I Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegi Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(2) : 39-50